



Analisis Penerapan Akuntansi Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Ulfi Siti Kholifah¹, Yulita Zanaria², Jawoto Nusantoro^{3*}

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro, Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: ulfisitikholidah@gmail.com¹
yulitazanaria13@gmail.com²
jawotonusantoro@gmail.com^{3*}

ARTICLE INFO

Article history:

Received 14 Juli 2024
Received in Revised 20
Agustus 2024
Accepted 30 September
2024

Keyword's :

Application of
Accounting, Public
Housing Service,
General Cash Book

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability of the application of accounting in the Metro City Public Housing and Residential Area Service. The type of research used is a qualitative descriptive method. The instruments used in this research are interviews and observations. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model. The research results show that the application of accounting in the Metro City Public Housing and Residential Area Service is not in accordance with Generally Applicable Accounting Principles. The accounting process carried out by the Metro City Perkim Service starts with all cash disbursement and cash receipt transactions which are recorded first in the General Cash Book (BKU). Document all transactions that occur and then journalize them. Transactions that cause cash disbursements are recorded in the cash disbursement journal and vice versa. It's just that the Department does not print out the journaling process and only makes it according to a computerized system.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan observasi. Analisa data dilakukan yaitu dengan menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro belum Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kota Metro dimulai dari semua transaksi pengeluaran kas dan penerimaan kas yang dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum (BKU). Mendokumentasikan seluruh transaksi yang terjadi lalu menjurnalnya. Transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja Dinas tidak melakukan *print out* untuk proses penjurnalan dan hanya membuatnya sesuai dengan sistem yang terkomputerisasi.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: jawotonusantoro@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. 2829-5609.

PENDAHULUAN

Reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan. Salah satu perubahannya yaitu setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan organisasi milik pemerintah (termasuk Rumah Sakit dan Puskesmas) menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi. Berbeda dengan organisasi non pemerintah yang berbentuk yayasan tetap menggunakan PSAK 45 dalam menyajikan laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan akan selalu terkait dengan standar pelaporannya, dalam pelaporan keuangan organisasi milik pemerintah sangat terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diterapkan pada entitas yang berorientasi non pemerintah termasuk yayasan. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diperuntukkan bagi entitas yang berorientasi pada masyarakat. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yaitu : prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (8) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu : rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Tujuan akuntansi pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu akuntansi juga merupakan suatu siklus, artinya akuntansi terdiri dari tahapantahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, maka pemerintah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya. Selain itu

laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai evaluasi efisiensi, efektivitas, kegiatan operasional pemerintah, serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Artinya pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah kepada daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan potensi, kebutuhan serta karakteristik daerah itu sendiri.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kedudukan Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam PERBUP Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) yaitu dimulai dari semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum (lampiran 9). Dimana dalam Buku Kas Umum tersebut terdapat kolom tanggal transaksi, uraian, penerimaan, pengeluaran dan kolom saldo untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi. Kemudian Dinas Perkim membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Fungsional. Selanjutnya mendokumentasikan transaksi yang terjadi dan menjurnalnya. Transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan transaksi penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah instansi yang berkedudukan sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur teknis Pemerintah Kota Metro. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pekerjaan konstruksi khususnya bangunan dan gedung pemerintah di

lingkungan Pemerintah Kota Metro. Basis akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA (laporan realisasi anggaran), belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO (laporan operasional) dan beban dalam neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Proses akuntansi pada Dinas Perkim Kota Metro adalah menyusun Buku Besar. Setelah buku besar, kemudian Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, selanjutnya membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang formatnya terdiri dari pendapatan daerah (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer), belanja daerah, belanja operasi (yang terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa), belanja modal (terdiri atas belanja peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya), Surplus/Defisit, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), (2) Laporan Posisi Keuangan (terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban dan ekuitas) (lampiran 1), (3) Laporan Operasional (terdiri atas Pendapatan; pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah; Beban, beban operasi, beban transfer; Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; Pos Luar Biasa) (lampiran 2), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (terdiri atas Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, RKPPKD, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan, Ekuitas Akhir) (lampiran 4), (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (lampiran 10). Selanjutnya proses akuntansi yang dilakukan yaitu membuat Jurnal Penutup, kemudian membuat Neraca Saldo Setelah Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Daerah. Laporan ini juga sebagai bukti komitmen mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data penerimaan dan pengeluaran kas selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Perumahan dan Kawansan Permukiman Kota Metro Tahun 2019-2022

No	Tahun	Penerimaan Kas (Rp)	Pengeluaran Kas (Rp)
1	2019	101.300.000	115.089.446
2	2020	136.900.000	139.035.267
3	2021	142.270.000	154.957.624
4	2022	149.520.000	158.317.546

Sumber: Data Sekunder (diolah 2023).

Pada Tabel 1 tampak bahwa setiap tahunnya penerimaan kas yang diperoleh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran kas yang digunakan. Pada tahun 2019 penerimaan kas sebesar Rp. 101.300.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 115.089.446. Tahun 2020 penerimaan kas sebesar Rp. 136.900.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 139.035.267. Pada Tahun 2021 penerimaan kas sebesar Rp. 142.270.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 154.957.624, sedangkan Tahun 2022 penerimaan kas sebesar 149.520.000 dengan pengeluaran kas sebesar Rp. 158.317.546. Terjadinya ketimpangan antara penerimaan dengan pengeluaran kas menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tidak mampu menyeimbangkan penerimaan dengan pengeluaran kas pada periode tertentu. Hal ini juga sekaligus membuktikan belum optimalnya pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak melakukan perhitungan rekonsiliasi bank pada setiap periode, sehingga tidak diketahui apakah terdapat perbedaan atau kekeliruan pencatatan antara akun kas pada Dinas dengan saldo kas yang dilaporkan bank. Selain itu Dinas Perkim juga tidak membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran.

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Penggunaan sistem pencatatan inilah yang membedakan antara pembukuan dengan akuntansi. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk ditarik suatu kesimpulan secara umum mengenai masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Pada dasarnya sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Metro sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dan Standar Akuntansi Pemerintah, dimana dikatakan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam Buku Kas Umum (lampiran 9), kemudian baru dilakukan jurnal umum sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Dinas Perkim Kota Metro yaitu transaksi, buku kas umum, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan.

Dari transaksi-transaksi di atas Dinas Perkim Kota Metro mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum seperti Tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel 2. Buku Kas Umum November 2022

Tanggal	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
02 Nov 2022	Diterima SP2D LS untuk pembayaran gaji	-	236.916.840	-	236.916.840
04 Nov 2022	Diterima SP2D LS untuk tambahan penghasilan PNS	-	50.426.202	-	287.343.042
04 Nov 2022	Diterima SP2D LS untuk gaji honorer teknis kantor	-	52.325.000	-	339.668.042
04 Nov 2022	Dibayarkan gaji pokok PNS	5.1.1.01.001	-	207.106.840	132.561.202
04 Nov 2022	Dibayarkan tunjangan keluarga	5.1.1.01.002	-	12.560.000	120.001.202
04 Nov 2022	Dibayarkan tunjangan jabatan	5.1.101.003	-	17.250.000	102.751.202
04 Nov 2022	Dibayarkan tunjangan beras	5.1.1.01.006	-	8.780.760	93.970.442

Sumber : Dinas Perkim Kota Metro.

Setelah semua transaksi dicatat ke dalam Buku Kas Umum, proses selanjutnya adalah membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional).

**Tabel 3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja- Fungsional) /
November 2022**

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	SPJ			Sisa Anggaran (Rp)
			s.d Bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s.d Bulan ini (Rp)	
51101001	Gaji Pokok PNS	2.222.423.669	654.951.753	258.132.236	913.083.989	1.309.348.680
51101002	Tunj.Keluar ga	191.456.062	90.509.638	18.866.369	109.376.007	82.080.055
51101003	Tunj. Jabatan	94.190.000	56.988.786	16.456.956	73.445.742	20.744.258
51101006	Tunj.Beras	145.781.460	52.570.280	9.045.000	61.615.280	84.166.180

Sumber : Dinas Perkim Kota Metro.

Setelah membuat Buku Kas Umum dan merekap biaya pengeluaran ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BelanjaFungsional), Dinas Perkim Kota Metro langsung membuat Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 2), Laporan Posisi Keuangan (lampiran 1), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (lampiran 10). Dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kota Metro di atas belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Pembahasan

Pada dasarnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Dimana pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dinas Perkim Kota Metro sebagai salah satu instansi pemerintah telah membuat Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dinas Perkim Kota Metro sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah telah membuat Laporan

Posisi keuangan sesuai dengan unsur-unsur seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 bahwa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) setidaknya menyajikan pos-pos berikut : (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka Panjang; (6) asset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka Panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP. Hanya saja masih terdapat beberapa kesalahan antara lain tidak menyajikan nilai penyusutan asset tetap Gedung dan bangunan, dimana Dinas Perkim Kota Metro hanya menyajikan harga perolehan asset tetap tersebut. Seharusnya Dinas Perkim Kota Metro menyajikan Nilai Buku asset tetap tersebut yaitu dengan cara mengurangkan Harga Perolehan dengan Akumulasi Penyusutan. Sehingga dapat diketahui nilai sebenarnya dari asset tetap Gedung dan bangunan tersebut. Selain itu Dinas Perkim Kota Metro tidak menghitung nilai akhir persediaan. Dimana pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat belanja persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 127.837.500.

Laporan Operasional memberikan informasi yang mencakup seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang berisi tentang pendapatanLO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dinas Perkim Kota Metro sebagai salah satu instansi pemerintah telah membuat Laporan Operasional sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Laporan perubahan ekuitas menjelaskan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Secara keseluruhan isi dari Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Dinas Perkim Kota Metro telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan dalam susunan dari setiap penjelasannya. Namun pada intinya Catatan Atas Laporan

Keuangan Dinas Perkim Kota Metro tersebut telah sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan informasi / penjelasan dari setiap laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bagi setiap pembaca ataupun penggunanya..

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro belum Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Kota Metro dimulai dari semua transaksi pengeluaran kas dan penerimaan kas yang dicatat terlebih dahulu dalam Buku Kas Umum (BKU). Mendokumentasikan seluruh transaksi yang terjadi lalu menjurnalnya. Transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja Dinas tidak melakukan *print out* untuk proses penjurnalan dan hanya membuatnya sesuai dengan sistem yang terkomputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H. (2022). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Agus, S. (2020). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Erlina. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwin, R. P. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Fitri, R. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Hidayah, N. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Imam, A. S. (2020). *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mirwan, D. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Pemerintah Indonesia. 2005, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010, Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2013, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. Jakarta.
- Pemerintah Kota Metro . 2016, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro* . Bagansiapiapi.
- Sumarsono, S. (2020). *Manajemen Keuangan Pemerintah* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syam, A. H. (2022). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syam, A. H. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tanjung, A. H. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta.

Yusniati. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.